

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Edwin Refpebry, (2018) : Pengawasan Internal Terhadap Keuangan Daerah Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan

Segala kegiatan dan program kerja yang dilakukan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan tidak terlepas dari penggunaan anggaran sebagaimana tercantum dalam APBD. Dalam penggunaan anggaran tersebut perlu dilakukan pengawasan secara internal oleh Inspektorat Daerah agar tidak terjadi penyimpangan dalam penggunaan anggaran tersebut. Dengan pengawasan tersebut diharapkan penggunaan anggaran memang benar-benar sesuai dengan plafon dan mata anggaran yang sudah ditetapkan, agar dapat menyentuh kebutuhan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam proses pengawasan tersebut perlu dilihat dan dikaji, apakah langkah-langkah yang ditentukan dalam pengawasan tersebut dapat dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, bagaimana tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, serta apa implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan, atau terhadap masyarakat. Dalam hal ini tentunya pihak-pihak yang berhubungan dengan pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah bersifat deskriptif, artinya memberikan gambaran yang jelas mengenai pengawasan internal terhadap keuangan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Dari hasil penelitian dapat diketahui, bahwa mekanisme pengawasan internal terhadap keuangan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, adalah dimulai pada tahap perencanaan yaitu rencana kerja dan program kerja yang dilakukan. Kemudian pelaksanaan anggaran terhadap rencana kerja dan program kerja tersebut, dan terakhir adalah pelaporan yang harus dilakukan oleh seluruh SKPD. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat secara internal memang masih ditemui adanya kekurangan pada SKPD,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekurangan tersebut menjadi catatan yang harus diperbaiki untuk anggaran tahun berikutnya.

Tindak lanjut atas pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pelalawan, dilakukan satu kali dalam setahun, bahwa berdasarkan hasil temuan dari bagian pengawasan lapangan, maka dibuatkan surat tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut yang diserahkan kepada Kepala Inspektorat/Inspektur. Kemudian surat hasil tindak lanjut dari pemeriksaan tersebut dikirim kepada SKPD yang bersangkutan, untuk dipelajari, dipedomani, dan dilakukan perbaikan sebagaimana yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Implikasi pengawasan keuangan daerah terhadap penguatan otonomi daerah, adalah sangat berhubungan dengan kelancaran dari program dan amanah dari otonomi daerah, karena dengan penggunaan anggaran yang cepat dan tepat sasaran, maka pelaksanaan pembangunan dapat terwujud dengan cepat dan pada akhirnya dapat menyentuh kesejahteraan masyarakat dalam berbagai bidang. Tentunya hal tersebut dapat tercapai apabila dalam penggunaan anggaran dapat dilakukan dengan tepat sesuai dengan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan, maka perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran tersebut agar tidak terjadi penyimpangan, dan secara tidak langsung dapat mewujudkan cita-cita dari otonomi daerah, yakni pemerataan pembangunan di segala bidang.